

1. Buku-Buku

- Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Anand, Gransham, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenanda Media Group, Jakarta
- Amirudin, & Asikin, Z, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dwi, Anke, Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- H, Ridwan R, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta
- Koesoemawati, Ira & Rijan, Yunirman, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Mahmud, Peter, Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- N, Asep, Mulyana, 2018, *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Grasindo, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ranuhandoko, I.P.M, 2006, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, Peter, & Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Penerbit Liberty, Jakarta.
- Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soekanto, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soekanto, & Mamudji, S, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta
- Sugondo, R, Notodisoeryo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Sumardjono, M

IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 MENGENAI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI DI DKI JAKARTA

CHRYSOTOFER, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Tedjasaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Yogyakarta.

Wayan, I. Suwendra, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Penerbit Nilacakra, Bali.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal, Makalah, dan Tesis

Dewi, N.W. (2017), *Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Terhadap Iktikad Buruk Klien*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Duwila, W.A. (2015), *Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Sebagai Pejabat Umum*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Husein, Yunus. (2003), *Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3.

Sari, M.P. (2017), *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peraturan Pem

IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 MENGENAI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI DI DKI JAKARTA

CHRYSOTOFER, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1087).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).

Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia.

D. Internet

Anonim, *Transparansi Pemilik Manfaat Korporasi*, <http://eiti.ekon.go.id/transparansi-beneficial-ownership/>

ASH/PHB, *Menelisik Peran Notaris Terkait Pemilik Manfaat Korporasi*, <https://kliklegal.com/menelisik-peran-notaris-terkait-beneficial-ownership>

Ghina Ghaliya Quddus, <https://nasional.kontan.co.id/news/akhirnya-indonesia-punya-perpres-beneficial-ownership>

Maryati Abdullah, *Menguak Pemilik Manfaat Korporasi Membongkar Kamouflase Ekonomi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguakbeneficial-ownership-membongkar-kamouflase-ekonomi>

M. Zhacky Kusumo, *KPK Bakal Jerat TPPU ke Bekas Perusahaan Sandiaga Uno*, <https://www.aktual.com/kpk-bakal-jerat-pasal-tppu-ke-bekas-perusahaan-sandiaga-uno/>

Nur Indah Fatmawati, *Pertama Kali KPK Jerat Korporasi jadi Tersangka Pencucian Uang*, <https://news.detik.com/berita/4026954/pertama-kali-kpk-jerat-korporasi-jadi-tersangka-pencucian-uang>.

Modul E-Learning PPAATK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang*, <http://elearning.ppatk.go.id/course/view.php?id=4§ion=1>.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PPATK, Perpre

Pidana,

IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 MENGENAI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT KORPORASI DI DKI JAKARTA

CHRYSSTOFER, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Universitas Gadjah Mada, 2019. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/775/perpres-beneficial-owner-bo-upaya-cegah-korporasi-digunakan-oleh-pelaku-tindak-pidana-.html.

Syafran Sofyan, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris,
www.indonesianotarycommunity.com.